

BAB II

KEBIJAKAN JERMAN DALAM MENANGANI ISU IMIGRAN

Dalam Bab II ini penulis akan membahas seputar Politik Jerman Terhadap Isu Imigran yang meliputi latar belakang pemerintahan Jerman, visi misi dari negara Jerman, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman terhadap para imigran yang berada di Jerman.

Negara Jerman merupakan gabungan antara bekas Jerman Barat (Republik Federal Jerman) dan bekas Jerman Timur (Republik Demokrasi Jerman) yang bersatu pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman adalah negara federal yang terdiri dari 16 Negara Bagian, dengan otonomi penuh kecuali kebijakan Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keuangan yang masih berada ditangan Pemerintah Pusat/Federal. Parlemen Jerman menetapkan bahwa Berlin kembali menjadi Ibukota Jerman, dan selanjutnya dilakukan pemindahan ibukota dari Bonn ke Berlin pada akhir tahun 1999.¹

¹http://dwpbaru.kbri-berlin.de/?page_id=10, diakses pada tanggal 29 Mei 2017 pukul 05:05

A. LATAR BELAKANG JERMAN

Penghormatan hak asasi manusia termasuk dalam undang-undang dasar. Jerman berupaya untuk melindungi orang di seluruh pelosok dunia terhadap pelanggaran hak-hak dan kebebasan pokok mereka. “Martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Semua organ kuasa negara wajib menghargai dan melindunginya.“ Inilah isi dari Pasal 1 Undang-Undang Dasar, yang mengikat Jerman pada hak asasi manusia sebagai “dasar bagi setiap masyarakat manusia, serta bagi perdamaian dan keadilan di dunia“. Keterikatan tersebut diperhatikan juga oleh Jerman dalam hubungan luar negerinya. Pelindungan dan penguatan hak asasi memegang peranan khusus dalam konteks politik luar negeri dan dalam hubungan antarnegara, sebab pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis sering kali merupakan langkah pertama ke arah konflik dan krisis. Bersama mitranya di UE dan dalam kerja sama dengan PBB, Jerman berupaya untuk melindungi dan mengembangkan standar hak asasi manusia di seluruh dunia.²

Jerman adalah pihak dalam semua perjanjian hak asasi manusia PBB yang penting serta dalam protokol tambahannya (Pakta Sipil, Pakta Sosial, Konvensi Antirasime, Konvensi Hak Perempuan, Konvensi Antipenganiayaan, Konvensi Hak Anak-Anak, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Antipenghilangan). Terakhir Jerman menandatangani Protokol Tambahan untuk Kesepakatan Melawan Penganiayaan serta

²<https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-manusia>, terakhir diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 10:13

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Kedua perjanjian tersebut berlaku sejak tahun 2009. Sebagai negara pertama di Eropa, Jerman juga meratifikasi Protokol Tambahan untuk Konvensi Hak Anak-Anak, yang memungkinkan gugatan secara individual.³

Pemerintah Federal Jerman mendukung perlindungan terhadap diskriminasi dan rasisme, serta aktif di seluruh dunia untuk menentang hukuman mati dan untuk mendukung partisipasi politik dan kepastian hukum. Pemerintah Jerman juga membela kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat, berjuang melawan perdagangan manusia, serta mendesak supaya diwujudkannya hak atas tempat tinggal serta hak atas air bersih dan perlengkapan saniter. Hampir 900 juta penduduk dunia tidak mempunyai akses pada air bersih. Dengan dana sebesar 400 juta Euro per tahun, Jerman menunjang sejumlah besar proyek untuk perbaikan situasi tersebut di 27 negara.⁴

Untuk kedua kali sejak tahun 2012, Jerman duduk sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swis. Pada tahun 2015, Jerman untuk pertama kali menjadi ketua dewan tersebut, jabatan yang dipegang oleh Duta Besar Joachim R cker selama satu tahun. Instrumen terpenting yang dipegang oleh Dewan Hak Asasia adalah "Pemeriksaan Negara-Negara Secara Berkala yang Bersifat Universal". Dalam pemeriksaan tersebut, setiap negara anggota PBB mengajukan laporan tentang

³ibid

⁴ibid

pelaksanaan tugasnya di bidang hak asasi, dan siap menghadapi pertanyaan kritis. Jerman telah melewati prosedur tersebut pada tahun 2009 dan 2013.⁵

B. PEMERINTAH JERMAN

Jerman merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Organ-organ konstitusi adalah Parlemen Federal (Bundestag), Majelis Federal, Presiden Federal, Pemerintah Federal, dan Mahkamah Konstitusi Federal. Jerman merupakan demokrasi parlementer berbentuk negara federasi. Organ konstitusi yang sangat dikenal masyarakat adalah Parlemen Federal, Bundestag. Anggotanya dipilih langsung setiap empat tahun oleh warga yang berhak memilih. Tugas terpenting parlemen adalah pembuatan undang-undang serta pengawasan pekerjaan pemerintah. Bundestag memilih kanselir federal yang akan memimpin pemerintah federal selama masa legislasinya. Kanselir berwenang menentukan garis besar kebijakan politik yang bersifat mengikat. Kanselir juga mengangkat para menteri federal serta wakil kanselir yang dipilihnya di antara para menteri. Namun dalam kenyataannya yang menjatuhkan pilihan adalah partai-partai yang terwakili dalam kabinet. Atas dasar keputusan mengenai pembagian kursi menteri dalam negosiasi pembentukan pemerintahan koalisi, mereka menentukan anggotanya yang menjadi menteri di resor jatahnya. Bila

⁵ibid

koalisi pecah, kanselir bisa jatuh sebelum masa legislasi berakhir, karena parlemen berhak menarik mandat kepala pemerintahan setiap saat. Dalam hal ini parlemen harus memilih pengganti kanselir melalui apa yang disebut “mosi tidak percaya konstruktif”. Tidak mungkin terjadi masa lowong dengan tidak adanya pemerintahan terpilih.⁶

i. Pembentukan Pemerintahan Koalisi di Jerman

Yang menentukan sifat parlemen adalah sistem pemilihan proporsional yang dimodifikasi. Berkat sistem itu, partai kecil terwakili juga di parlemen secara proporsional dengan jumlah suara yang diperoleh. Dengan satu kali pengecualian, Pemerintah Jerman selalu dibentuk melalui persekutuan antara berbagai partai yang sebelumnya bersaing dalam kampanye pemilihan. Sejak pemilihan parlemen pertama di tahun 1949 terbentuk 23 pemerintahan koalisi. Untuk menghindari adanya fragmentasi parlemen dan untuk memudahkan pembentukan pemerintahan, setiap partai harus mencapai minimal 5% dari jumlah suara yang sah (atau tiga mandat langsung) untuk dapat masuk dalam Bundestag.⁷

Ciri Jerman sebagai negara yang berbentuk federasi tampak pada ke-16 negara bagian yang sangat mandiri, terutama dalam urusan kepolisian, penanggulangan bencana, yustisi, pendidikan, dan kebudayaan. Berdasarkan alasan sejarah, kota-kota Berlin, Hamburg, dan Bremen juga merupakan negara bagian. Hal yang sangat khas

⁶<https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/negara-dan-politik/negara-federasi>, terakhir diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 06:59

⁷ibid

adalah keterkaitan erat antara negara bagian dan lembaga kenegaraan sentral, yang memungkinkan negara bagian berperan serta dalam politik Federasi. Wadah utama untuk partisipasi tersebut adalah Majelis Federal (Bundesrat), yaitu majelis kedua yang juga berkedudukan di Berlin dan yang terbentuk dari wakil-wakil pemerintah negara bagian. Jumlah wakil di Bundesrat dari beberapa negara bagian yang padat penduduknya lebih banyak, dibanding negara bagian yang berpenduduk rendah. Juga partai yang termasuk oposisi pada tingkat Federasi atau yang tidak terwakili di Bundestag dapat memengaruhi politik Berlin melalui keanggotaan dalam pemerintah negara bagian. Ini dikarenakan berbagai undang-undang dan peraturan pada tingkat Federasi memerlukan persetujuan Majelis Federal. Kedua partai yang fraksinya paling kecil di Bundestag, yaitu Bündnis 90/Die Grünen (Partai Hijau) dan Die Linke (Partai Kiri), untuk pertama kali mengisi posisi perdana menteri di salah satu negara bagian sejak 2011 dan 2014 (Baden-Württemberg dan Thüringen).⁸

Karena pemilihan umum di negara-negara bagian tidak bersamaan waktu, dan masa legislasi pun bervariasi, dapat terjadi perbandingan kekuatan yang berubah-ubah di Majelis Federal selama satu periode legislasi Bundestag. Dalam susunan perwakilan negara bagian saat ini, Pemerintah Federal tidak memiliki mayoritas yang pasti dalam Majelis Federal. Kubu politik yang selalu seragam sikapnya dalam pemungutan suara saat ini tidak ada di Bundesrat, karena di ke-16 negara bagian terdapat koalisi yang sangat beraneka ragam. Sejak terbentuknya Republik Federal Jerman tidak pernah

⁸ibid

terjadi begitu banyak kombinasi mitra koalisi. Hanya di Bavaria semata pemerintahan CSU terbentuk tanpa mitra koalisi.⁹

ii. Presiden Federal di Negara Jerman

Menurut aturan protokol, pejabat negara tertinggi adalah Presiden Federal. Kepala negara itu tidak dipilih oleh rakyat, melainkan oleh Dewan Federal yang dibentuk khusus. Setengah dari anggota dewan terdiri dari anggota Bundestag, setengah lain dari utusan yang dipilih oleh parlemen negara bagian secara proporsional dengan jumlah kursi dari masing-masing fraksi di parlemen yang bersangkutan. Presiden dipilih untuk periode lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua saja.¹⁰

Sejak tahun 2012 Joachim Gauck menjabat sebagai Presiden Federal. Gauck, yang tidak terikat pada partai, dahulu bekerja sebagai pendeta Protestan di bekas Jerman Timur. Selama revolusi damai tahun 1989/1990 dia aktif dalam gerakan pembela hak kewarganegaraan. Joachim Gauck adalah Presiden Jerman ke-11 sejak tahun 1949. Meskipun tugas presiden federal pada pokoknya bersifat representatif, dia dapat menolak membubuhkan tanda tangannya pada undang-undang, apabila persesuaian undang-undang itu dengan konstitusi disangsikannya. Para pemegang jabatan presiden berpengaruh paling kuat lewat pidato di muka umum yang selalu mendapat perhatian

⁹ibid

¹⁰ibid

besar. Mereka tidak mengambil sikap dalam politik kepartaian, akan tetapi membahas tema-tema aktual, sambil kadang-kadang menyerukan kepada pemerintah, parlemen atau penduduk untuk bertindak. Tema-tema yang sering dibahas oleh Joachim Gauck adalah masalah hak asasi manusia, tanggung jawab Jerman atas nasib sendiri, dan ancaman bagi demokrasi.¹¹

iii. Mahkamah Konstitusi Federal di Karlsruhe Menjaga Undang-Undang Dasar

Lembaga yang memiliki pengaruh besar adalah Mahkamah Konstitusi Federal di Karlsruhe. Reputasinya tinggi di kalangan masyarakat. Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai “Penjaga Undang-Undang Dasar” yang menyediakan tafsir baku terhadap teks konstitusi melalui putusannya. Kedua dewan hakimnya memutuskan perkara perselisihan kompetensi antara organ-organ konstitusi, dan dapat membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Setiap warga negara Jerman dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi apabila dia merasa bahwa hak asasinya dilanggar oleh salah satu undang-undang.¹²

¹¹ibid

¹²ibid

C. ISU IMIGRAN

i. Suaka dan kebijakan pengungsi di Jerman

Pasal 16a UU Dasar memberikan korban penganiayaan politik hak individu suaka. Hak dasar suaka sehingga memiliki prioritas tinggi dan menyatakan kesediaan Jerman untuk memenuhi kewajiban sejarah dan kemanusiaan mengakui pengungsi. Prosedur penerimaan bagi pencari suaka diatur oleh Asylum Prosedur Act (AsylVfG). Pencari suaka yang berwenang perbatasan mengizinkan untuk masuk Republik Federal Jerman atau yang ditemukan di negara itu tanpa izin tinggal ditransfer ke pusat penerimaan terdekat dari negara yang relevan. Menggunakan sistem nasional untuk distribusi awal, mereka ditugaskan ke pusat-pusat penerimaan negara Jerman individu sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam Asylum Prosedur Act.¹³

ii. Proses suaka di Jerman

Berikutnya, permohonan suaka mereka diserahkan ke cabang yang bertanggung jawab dari Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) untuk pemeriksaan

¹³http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Asylum-Refugee-Protection/Asylum-Refugee-Protection_Germany/asylum-refugee-policy-germany_node.html, diakses pada tanggal 9 April 2017 pukul 22:03

dan keputusan. pencari suaka menerima sertifikat izin untuk tinggal yang memberikan hak awal untuk tinggal di Republik Federal Jerman selama prosedur suaka.¹⁴

BAMF pekerja kasus pribadi mempertanyakan pencari suaka (dengan bantuan penerjemah) pada rute perjalanan mereka dan alasan untuk penganiayaan. Atas permintaan, pencari suaka perempuan dapat dipertanyakan oleh seorang pekerja kasus perempuan dilatih jika alasan untuk penerbangan khusus untuk wanita. Wawancara dicatat secara tertulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa pencari suaka, dengan salinan diberikan kepada pencari suaka. Keputusan pada aplikasi suaka didasarkan pada wawancara dan setiap penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan. pencari suaka diberitahu tentang keputusan secara tertulis dan diberi informasi tentang upaya hukum.¹⁵

Jika aplikasi suaka diterima, orang diberi status suaka dan orang-orang status pengungsi diberikan menerima izin tinggal sementara dan diberikan status yang sama seperti Jerman dalam sistem asuransi sosial. Mereka berhak untuk kesejahteraan sosial, tunjangan anak, tunjangan anak penggalangan, integrasi tunjangan dan kursus bahasa serta bentuk-bentuk bantuan integrasi.¹⁶

Jika tidak suaka atau pengungsi perlindungan dapat diberikan, BAMF meneliti dalam perjalanan prosedur suaka apakah ada alasan untuk larangan deportasi.

¹⁴ibid

¹⁵ibid

¹⁶ibid

Kewajiban ini untuk melakukan tinjauan ekstensif dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada penundaan proses. Terpisah dari prosedur suaka, yang bertanggung jawab asing otoritas meminta pendapat ahli dari BAMF dan memeriksa apakah larangan deportasi berlaku. Sebagai aturan, pencari suaka yang aplikasinya telah ditolak diminta untuk meninggalkan negara itu.¹⁷

D. SIKAP PEMERINTAH JERMAN TERHADAP ISU IMIGRAN

Ketika sejumlah negara Eropa silang pendapat soal kedatangan ratusan ribu imigran dari berbagai negara konflik, Jerman merupakan salah satu negara yang menyatakan siap untuk menampung para imigran. Pengamat internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dr. CPF Luhulima menilai alasan utama penerimaan Jerman terhadap imigran adalah karena para imigran berpotensi memperkuat sektor tenaga kerja Jerman, yang tentunya akan berujung pada penguatan ekonomi. Merujuk dari data penuaan warga yang dirilis oleh Komisi Eropa tahun ini, populasi Jerman akan menurun dari 81,3 juta orang pada 2013 menjadi 70,8 juta orang pada 2060. Dari jumlah tersebut, prediksi warga yang berusia 65 tahun ke atas akan meningkat dari 32 persen pada tahun ini, menjadi 59 persen pada 2060. Jerman, karenanya, diprediksi

¹⁷ibid

akan kekurangan warga usia produktif, yang mengancam sektor ketenagakerjaan dalam negeri.¹⁸

Luhulima memperingatkan bahwa tidak semua imigran akan mudah mendapatkan pekerjaan di Jerman. Bagi mereka yang tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, bisa jadi tidak mendapatkan pekerjaan. "Proses pendataan terhadap imigran juga akan menunjukkan apakah mereka melarikan diri dari negara asal karena konflik, atau karena faktor ekonomi sehingga terancam dideportasi," kata Luhulima.¹⁹

Menurut sistem pengajuan suaka yang dirilis Komisi Eropa, suaka akan diberikan kepada mereka yang melarikan diri dari peperangan dan konflik berkepanjangan di negara asal. Sistem ini juga menyebutkan bahwa seluruh negara Eropa memiliki tanggung jawab yang setara untuk menampung dan memberikan perlindungan kepada pengungsi.²⁰

Analisis ini dikutip berdasarkan paparan pengamat internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dr. CPF Luhulima. Dirinya menilai penerimaan Jerman bersama tangan terbuka pada arus ribuan imigran khususnya pengungsi Suriah yaitu sebab Jerman percaya arus imigran itu bakal menguatkan bagian tenaga kerja. Penguatan tenaga kerja berarti pun penguatan ekonomi. Seperti yg didapati, Jerman yakni salah satu negeri di Eropa yg miliki pertumbuhan masyarakat

¹⁸<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-Jerman-kepada-imigran/>, diakses pada tanggal 7 April pukul 23:43

¹⁹ibid

²⁰ibid

yg minim, angkatan tenaga kerja di Jerman biasanya didominasi oleh para imigran. CNN melansir, data penuaan penduduk yg dihitung oleh Instansi Komisi Eropa di 2015 ini, komunitas German dapat menurun dari 81,3 juta orang terhadap 2013 jadi 70,8 juta orang terhadap 2060. Berdasarkan perhitungan tersebut, prediksi masyarakat yg berumur 65 th ke atas dapat meningkat dari 32 prosen kepada th ini, jadi 59 % terhadap 2060. Artinya jumlah tenaga kerja umur produktif di Jerman bakal tetap berkurang lantaran minimnya pertumbuhan masyarakat lokal. Adanya para pendatang imigran diyakini dapat menguatkan tenaga kerja di Jerman dalam sekian banyak th akan datang.²¹

Berdasarkan pengamatan dari Dinna Wisnu, salah satu orang pengamat interaksi internasional di Kampus Paramadina, aksi Jerman yg teramat terbuka kepada imigran khususnya pengungsi Suriah dengan cara perlahan bakal menggenjot ekonomi negara Jerman. Tuturnya dalam hukum ekonomi, arus pekerja umur produktif merupakan kunci penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengalaman panjang bangsa Jerman dalam urusan perang, derita pengungsi & imigran tatkala Perang Dunia ke 2 menciptakan ras & budaya di Jerman amat terbuka kepada arus para pencari suaka, terutama dari pengungsi Suriah. Ada kecenderungan bahwa Jerman sedang jalankan upaya membalas “hutang budi” pada kekejaman zaman Nazi yg pernah menindas bangsa lain akibat Perang Dunia ke 2 puluhan tahun lalu.²²

²¹<https://bencanaalamglobal.wordpress.com/2015/09/15/2-alasan-di-balik-keikhlasan-Jerman-menampung-pengungsi-suriah/>, diakses pada tanggal 20 April pukul 20:59

²²ibid

E. KEBIJAKAN JERMAN TERHADAP ISU IMIGRAN

Kanselir Jerman Angela Merkel membuka pintu Jerman kepada puluhan ribu pengungsi yang terdampar di seluruh Eropa selatan dengan deklarasi yang sekarang terkenal, "We Can Do It !," dia memperjuangkan kehidupan politiknya. Popularitasnya telah tenggelam sampai tingkat terendah. Yang paling kanan adalah berkuasa. Dan partai Kristen Demokrat Union (CDU) sendiri dan sekutu politiknya menyerangnya setiap hari. Bahkan rekan koalisinya yang kiri, Demokrat Sosial yang tidak populer, telah menoleh kepadanya, mengklaim bahwa "dia" (mereka juga di pemerintahan, bagaimanapun juga) telah berbuat terlalu sedikit untuk meredakan meningkatnya kecemasan Jerman atas sikap negara tersebut. Merkel dan CDU mendapat pukulan yang menakjubkan ketika, untuk pertama kalinya, partai sayap kanan, Alternative for Germany (AfD), keluar dari CDU dalam sebuah pemilihan regional. Setahun sebelum pemilihan nasional di mana Merkel tidak berkomitmen untuk mencalonkan diri pendirian politik Jerman kacau balau.²³

Ironisnya, pemerintah Merkel memiliki dalam jumlah besar, berhasil baik dalam menghentikan arus pengungsi ke negara tersebut dan dalam memproses dan mengakomodasi para pencari suaka yang telah mencapainya. Ribuan orang tiba di Jerman yang tidak siap setiap hari, dari negara-negara di Timur Tengah, Afrika Utara,

²³<https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/09/merkel-isis-refugee-germany-afd/499550/>, diakses pada tanggal 25 April 2017 pukul 15:29

dan Balkan. Kolom para migran bergerak melintasi ladang dan jalan raya. Keluarga menetap di kamp-kamp yang meluap atau tidur di bawah bintang-bintang di kota-kota besar. 1,1 juta pengungsi masuk Jerman. Tapi sejauh ini tahun ini, hanya 226.000 orang yang mengajukan permohonan suaka politik; Pada bulan Juni, hanya 20.000 yang melakukannya.²⁴

Angka yang berkurang secara dramatis, pada tingkat yang besar, meski tidak secara eksklusif, merupakan hasil kerja pemerintah Merkel. Sementara Berlin dengan gigih menolak untuk menetapkan batas maksimum atau menutup perbatasan Jerman, namun secara perlahan mengubah sikap pintu terbuka. Negara-negara Balkan, serta Maroko dan Tunisia, sekarang dianggap sebagai "negara yang aman," yang berarti warganya tidak lagi memenuhi syarat untuk suaka politik (sebuah perubahan yang dilakukan kelompok hak asasi manusia dengan tajam). Selain itu, pihak berwenang Jerman dapat memberi mereka masa tinggal satu tahun jika keamanan mereka di tanah air mereka dianggap tidak tetap (namun tidak menjamin suaka politik).²⁵

Merkellah yang menjadi perantara pakta migrasi kontroversial UE dengan Turki. Per kesepakatan tersebut, pemerintah Turki setuju untuk menghentikan eksodus migran ke Eropa melalui Turki, dan menerima migran dari Yunani, dengan imbalan bantuan dan janji perjalanan bebas visa di Eropa. Syarat-syarat ini juga telah menarik kritik

²⁴ibid

²⁵ibid

karena catatan hak asasi manusia Turki. Pada saat yang sama, pakta tersebut telah membantu membendung arus pencari suaka. Jerman juga mendapat keuntungan dari penutupan rute Balkan, sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara-negara garis depan kawasan dan Austria dengan mengamankan perbatasan mereka secara militer, yang merupakan langkah yang ditolak Merkel.²⁶

Jerman sekarang sudah lebih siap menghadapi arus. Meskipun pemrosesan birokrat pencari suaka birokrasi masih rumit, Jerman sekarang memiliki mesin untuk melakukannya dengan efisien: Proses aplikasi lebih cepat, kekuatan penerjemahan bahasa yang relevan ada di tempat, dan administrator lokal dan sukarelawan sekarang diuji perang dan kompeten. Sederhananya, orang Jerman sekarang sudah melakukan latihan. Lebih baik, setidaknya, daripada yang mereka lakukan setahun yang lalu.²⁷

Ini meluas ke ruang kewarganegaraan Jerman. Tidak lagi amal dan gereja menjerit relawan membangun tempat tidur dan mengumpulkan jaket musim dingin. Sebagai gantinya, mereka mengajar ribuan pencari suaka dan mengenali pencari suaka untuk berbicara bahasa Jerman, dan menawarkan kursus wajib tentang budaya dan penduduk Jerman. Manfaat ditahan dari mereka yang tidak berpartisipasi ukuran Merkel kontroversial lainnya yang dimaksudkan untuk menenangkan hak. Undang-undang

²⁶ibid

²⁷ibid

baru memperlancar pengenalan pelamar dan pencari suaka ke dalam angkatan kerja, dan anak-anak masuk sekolah.²⁸

Jerman, sebuah negara dengan catatan pasca perang yang terpadu untuk mengintegrasikan para imigrannya, telah banyak berinvestasi dalam membawa pencari suaka ke dalam lipatan. Pada tahun 2016, Bundestag mengeluarkan undang-undang yang mengalokasikan 7 miliar euro, setara dengan sekitar \$ 7,7 miliar, menuju integrasi. 500 juta euro lainnya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan sosial pada 2017 dan 2018. Pemerintah telah berjanji untuk menciptakan lebih dari 100.000 "kesempatan kerja" baru untuk pendatang baru. Berlin juga telah menanggukkan undang-undang yang menetapkan bahwa bisnis Jerman memprioritaskan pelamar kerja Jerman atau EU mengenai pencari suaka.²⁹

Pemerintah Merkel telah berbuat begitu banyak untuk mengatasi kekacauan krisis 2015, Meskipun jajak pendapat masih menunjukkan bahwa kebanyakan orang Jerman menyukai migrasi dan mempertahankan hak suaka, telah terjadi pergeseran dramatis. Misalnya, 41 persen orang Jerman setuju bahwa "kita seharusnya tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh migran," versus hanya 28 persen yang setuju dengan sentimen itu. Saat ini, 60 persen percaya bahwa migran sendiri harus beradaptasi untuk tinggal

²⁸ibid

²⁹ibid

di Jerman (bukan Jerman sendiri yang membuat beberapa penyesuaian juga); Pada 2014, angka itu hanya 36 persen.³⁰

Sedangkan Merkel dan sekutu politiknya: dalam sebuah jajak pendapat pada bulan September 2015, tepat setelah puncak krisis migran, dia mendapat peringkat persetujuan sebesar 63 persen. Saat ini, hanya 45 persen orang Jerman yang mengatakan bahwa mereka puas dengan dia. Partainya saat ini melakukan pemungutan suara dengan dukungan sebesar 33 persen, turun dari hasil 41,5 persen dalam pemilihan federal 2013. AfD yang akan mengumpulkan 14 persen di seluruh negara adalah pemilihan nasional.³¹

Keberhasilan AfD baru-baru ini di Mecklenburg-Vorpommern utara, sebuah negara pedesaan yang hanya memiliki 1,5 juta penduduk, secara dramatis menggarisbawahi tren ini. Partai tersebut, yang telah mendapatkan momentum di parlemen daerah Jerman sejak berdirinya tiga tahun lalu, menghitung rekor tertinggi 21 persen suara, yang kedua setelah Demokrat Sosial. Semua partai utama kehilangan suara ke sayap kanan, yang secara efektif mengubah pemilihan menjadi sebuah referendum mengenai kebijakan migrasi Jerman.³²

AfD memfokuskan kampanyenya hampir secara eksklusif pada kebijakan pro-pengungsi koalisi sentris Merkel. Ini membuat kampanye javascript yang terang-

³⁰ibid

³¹ibid

³²ibid

terangan dengan nada rasis, berpendapat bahwa para pengungsi akan meningkatkan kejahatan, melecehkan wanita Jerman, mencuri pekerjaan Jerman, mengancam keamanan nasional Jerman, dan mencemari budaya Jerman. Secara kritis, pemungutan suara tersebut merupakan yang pertama di Jerman sejak negara tersebut menderita tiga serangan teroris musim panas ini, dua di antaranya melibatkan pengungsi, mengakibatkan sembilan korban tewas dan luka-luka pada dua lusin orang. Dan setelah pemungutan suara, polisi Jerman menahan tiga orang Suriah karena dicurigai memiliki hubungan dengan Negara Islam tersebut dan memiliki hubungan dengan kelompok tersebut pada 13 November di Paris.³³

³³ibid